

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan komunikasi, informasi, dan teknologi di Indonesia. Kominfo memiliki peran penting dalam membangun infrastruktur telekomunikasi, mengatur media, serta mengembangkan ekosistem digital nasional [9].



Gambar 2.1. Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Indonesia

Sumber: [10]

Awal mula Kominfo dapat ditelusuri sejak berdirinya Departemen Penerangan Republik Indonesia (Deppen) pada 19 Agustus 1945. Departemen ini bertugas mengelola penyebaran informasi dan propaganda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia [11]. Salah satu tonggak sejarah penting adalah berdirinya Radio Republik Indonesia (RRI) pada 11 September 1945 dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara [12].

Namun, pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan. Setelah pembubaran Deppen, tugas-tugas komunikasi dan

informasi ditangani oleh lembaga lain [13]. Pada tahun 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi yang kemudian berkembang menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada 2005 [14]. Depkominfo memiliki tugas utama dalam pengelolaan telekomunikasi, penyiaran, serta layanan informasi publik. Pada masa ini, regulasi di bidang telekomunikasi dan penyiaran mulai diperketat dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pada 2009, dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Depkominfo bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Perubahan ini menandai pergeseran fokus dari sekadar penyiaran dan komunikasi menjadi digitalisasi dan teknologi informasi [15].

Beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan Kominfo antara lain:

- Palapa Ring Project (dimulai pada 2016) untuk pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.
- Regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan tata kelola internet.
- Pengembangan ekosistem digital nasional, termasuk literasi digital dan *e-Government*.

Di era digitalisasi dan Industri 4.0, Kominfo terus berperan dalam percepatan transformasi digital, pengembangan ekonomi berbasis teknologi, serta regulasi terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi di Indonesia.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan komunikasi dan teknologi informasi, Diskominfo memiliki visi berikut: "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Untuk merealisasikan visi tersebut, Diskominfo menetapkan beberapa misi strategis [16], yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

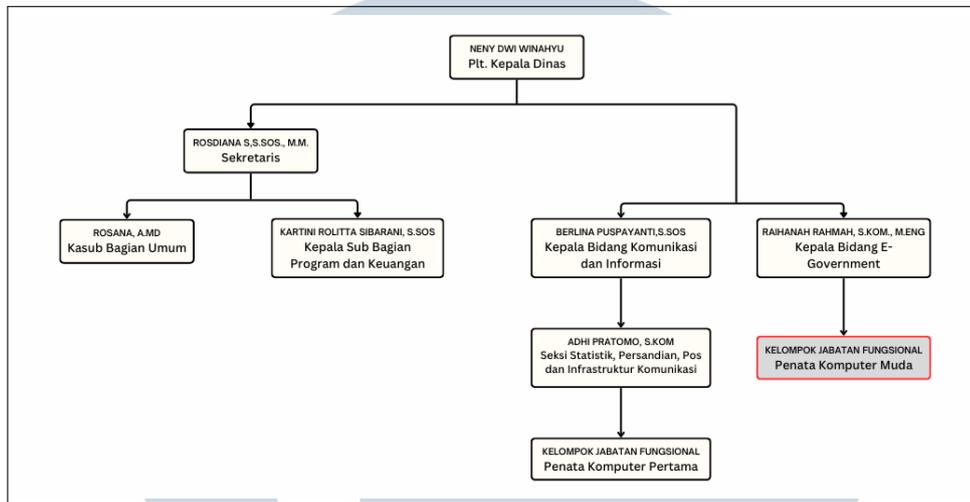
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Melalui Kabinet Merah Putih, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan digitalisasi sebagai penggerak utama kemandirian bangsa di era teknologi. Program transformasi digital mencakup [16]:

- Pemerataan infrastruktur digital hingga pelosok tanah air.
- Digitalisasi data pemerintahan untuk efisiensi dan transparansi.
- Pengembangan inovasi teknologi di bidang pertanian dan UMKM.
- Literasi digital dan kolaborasi dengan institusi pendidikan serta industri.
- Promosi budaya Indonesia secara global melalui media digital.
- Pembangunan ekosistem digital yang kompetitif dan inklusif.

Visi dan misi ini menjadi dasar pijakan Diskominfo untuk berkontribusi dalam transformasi digital nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024

Sumber: [17]

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Balikpapan merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Diskominfo Kota Balikpapan mengacu pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah [18].

Diskominfo Kota Balikpapan memiliki peran penting dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, Diskominfo memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan *e-Government*, persandian, dan statistik sektoral.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan *e-Government*, persandian, dan statistik sektoral.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan informasi,

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan *e-Government*, persandian, dan statistik sektoral.

- Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo.

Berikut penjelasan lebih detail tentang susunan organisasi Diskominfo Kota Balikpapan:

- Kepala Dinas, bertugas memimpin dan mengawasi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Balikpapan. text
- Sekretariat, yang membawahi:
 - Subbagian Program dan Keuangan: Bertanggung jawab dalam perencanaan program kerja, pengelolaan anggaran, dan pelaporan keuangan.
 - Subbagian Umum: Melakukan administrasi umum dan pengelolaan sumber daya manusia.
- Bidang Informasi dan Komunikasi, yang membawahi:
 - Seksi Statistik, Persandian, Pos, dan Infrastruktur Telekomunikasi: Melaksanakan pengelolaan data statistik, persandian, serta pengembangan infrastruktur telekomunikasi.
 - Kelompok Jabatan Fungsional: Mengembangkan dan melaksanakan fungsi teknis di bidang informasi dan komunikasi.
- Bidang *e-Government*, yang membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional: Mengembangkan sistem dan layanan *e-Government* untuk mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan Kota Balikpapan.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD): Melaksanakan layanan teknis operasional sesuai dengan kebijakan Diskominfo.